

BERITA ACARA PENGUJIAN UJI KONSEKUENSI
 NOMOR : 480 / 16 / 1348 / 2018

Pada hari ini kamis tanggal tiga belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
UMUM					
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan J	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
112	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
113	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
114	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai dengan telah diaudit oleh aparaturnya pemeriksa/pengawas/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
115	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Atas jnin yang bersangkutan	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi

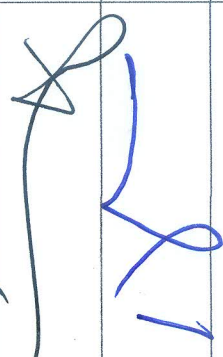




BERITA ACARA PENGUJIAN UJI KONSEKUENSI
NOMOR : 480 / 16 / 1348 / 2018

Pada hari ini kamis tanggal tiga belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegay telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
UMUM					
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
112	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
113	Identifikasi potensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan PNS - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
114	900 KEUANGAN Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai dengan telah diaudit oleh aparaturnya pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
115	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Atas jijn yang bersangkutan	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	SETDA KABUPATEN TEGAL	
2	Drs EKO JATI SUNTORO, M.Si.	Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Tegal	SETDA KABUPATEN TEGAL	
3	MOH NUR. MA'MUN,SH.M.Hum	Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal	SETDA KABUPATEN TEGAL	
4	BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, M.Si	Inspektur Kabupaten Tegal	INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL	
5	BUDI SUKAMTO, S.IP	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal	BPKAD KABUPATEN TEGAL	
6	Drs. KUSHARTONO HR	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tegal	DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL	

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
SELAKU
ATASAN PIDDPTAMA



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001